



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENYEMPURNAAN RANWAL RENJA 2027 DINSOSP3AKB



JALAN SUTAN SYAHRIR NO. 54 SANGGAU 78512

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2027 dapat disusun dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Pada prinsipnya Rancangan Awal Renja merupakan Dokumen Acuan Operasional pelaksanaan kegiatan Tahun 2027 yang dalam penyusunannya berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2026 dan dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh Unit-unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2027 merupakan pelaksanaan teknis selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Kami menyadari bahwa Rancangan Awal Renja ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Rancangan Awal Renja ini masih jauh dari sempurna, tetapi kami berharap Rancangan Awal Renja ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya Semoga Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan bagi peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau **“Pelayanan Sosial yang Berkualitas dan Berkeadilan, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menuju Keluarga yang Sejahtera”**.

Sanggau, 18 Februari 2026
Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sanggau



VALENTINUS SUDARTO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19840402 200604 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA RENJA	6
BAB II	7
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINSOSP3AKB KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	66
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	70
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	71
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	101
BAB III	103
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN	103
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah	103
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (Kementrian Sosial)	103
3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)	104
BAB IV	130
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	130
BAB V	164
P E N U T U P	164

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diketahui bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen Rencana Awal Rencana Kerja untuk tahun 2027. Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan istilah Ranwal Renja merupakan dokumen perencanaan yang perangkat daerah dengan terlebih dahulu mengevaluasi realisasi target kinerja tahun sebelumnya dan melakukan proyeksi untuk tahun berikutnya. Dalam kenyataannya dokumen Renja haruslah seiring sejalan dengan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen referensi perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian dokumen Renja mengacu pada dokumen Rencana Strategis begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja merupakan cikal bakal dari Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dokumen Renja adalah acuan ketika menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dokumen Renja idealnya juga disusun dengan kajian terhadap dokumen Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga serta dokumen Rencana Kerja Provinsi sehingga apa yang dilaksanakan di Kabupaten Sanggau linier dan memiliki kolerasi dengan program nasional dan program provinsi sehingga formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah memiliki sinergisitas sehingga memberikan ruang akselerasi implementasi kebijakan pembangunan berazaskan keadilan demi kesejahteraan seluruh rakyat di

Kabupaten Sanggau. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja berada pada posisi yang sangat penting bagi perangkat daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menyusun dokumen Rencana Kerja untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak serta keluarga berencana menuju keluarga yang sejahtera.

Proses Penyusunan Rencana Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya

Renstra Tahun 2025-2029 telah disusun sebelumnya sehingga dapat menjadi dasar penyusunan Ranwal Renja 2027 akan dijadikan sebagai bahan perumusan rancangan untuk menyusun Rencana Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan berfungsi sebagai koridor perencanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) tahun 2027 ini memuat informasi tentang Sasaran, indikator kinerja, target pencapaian kinerja, kebutuhan Pagu indikatif, sumber dana dan prakiraan maju rencana tahun 2027.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2027 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Stándar Teknis Pelayanan Dasar pada Stándar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari kekerasan berbasis Gender dalam Bencana.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Stándar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Kepmendagri 900.1.2850 tentang Perubahan ketiga atas keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata cara Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

20. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya dokumen Rencana Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2027 ini adalah untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat target kinerja, realisasi dan proyeksi. Tujuan disusunnya dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2027 antara lain :

1. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
2. Memberikan panduan dalam rangka membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau dalam mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
3. Menyajikan dokumen sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.

1.3.2.TUJUAN

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2027 diantaranya :

- a. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan.
- b. Memberikan panduan dalam rangka membantu perangkat daerah mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan.

- c. Menyajikan dokumen sebagai salah satu referensi dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA RENJA

Sistematika Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 DAN CAPAIAN KINERJA

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau Tahun lalu dan capaian Renstra Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau
- 2.2 Analisis kinerja Pelayanan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN DINSOSP3AKB

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinsosp3akb
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOSP3AKAB KABUPATEN SANGGAU

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINSOSP3AKB KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan untuk menemukan dan memecahkan permasalahan dalam bentuk rekomendasi. Dengan melakukan evaluasi akan ditemukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam implementasi kebijakan yang dalam hal ini terkait dengan target realisasi baik dari sisi serapan anggaran maupun kinerja perangkat daerah Dinsosp3akab.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau 2025-2029. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam perencanaan sehingga meningkatkan efektivitas dan produktivitas sehingga kita dapat mengetahui tingkat kemajuan suatu kegiatan, tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuan serta hal-hal yang harus dilakukan dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memperoleh masukan dalam bentuk rekomendasi dalam rangka memberikan masukan bagi proses dan tahapan kebijakan kedepan sehingga menjadi lebih berkualitas dan berintegritas.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2027 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Dinsosp3akb. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau pada Tahun 2026 memuat 16 (Enam Belas) program dan 34 (tiga puluh Empat) dan 111 (Seratus sebelas) Sub kegiatan. Total alokasi anggaran Dinsosp3akb pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.16.132.697.896,95,- . Dengan realisasi sampai Per 31 November sebesar 12.026.187.001,-. Untuk realisasi Anggaran Tahun 2025. Dimana hal tersebut dikarenakan besarnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Dal Duk KB pada tahun 2025 yang merupakan anggaran Dominan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	15.677.720.347,81-	16.132.697.896,95-	12.026.187.001,-	74,55
TOTAL		15.677.720.347,81-	16.132.697.896,95,-	12.026.187.001,-	74,55

Tahapan berikutnya diuraikan rangkaian pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian PPKS

Sasaran 1 ditunjang dengan 6 (Enam) program yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Didukung dengan 8 (Delapan) kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal. Berikut capaian kinerja sasaran 1 tersaji pada tabel:

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kemandirian PPKS	Indikator keluaran : Persentase PPKS yang mandiri	30,49%	30, 94 %	101%
	Program Pemberdayaan Sosial	100 %	80%	100 %
	Kegiatan Pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %	80%	80 %
	Program Penanganan	80 %	80%	80 %

	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			
	Kegiatan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	100 %	100%	100%
	Program Rehabilitasi Sosial	100 %	100%	100 %
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	100%	100%	100%
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	80 %	80%	80 %
	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	100%	100%	100 %

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	Program Penanganan Bencana	100 %	100%	100%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %	100 %	100 %
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	3 TMP	100%

Indikator Kinerja Sasaran strategis 1 ini adalah :

- Persentase PPKS yang mandiri

Sedangkan untuk indikator program pada sasaran 1 ini adalah

1. Program Pemberdayaan Sosial

Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial. Realisasi capaian indikator program Pemberdayaan Sosial adalah 78,35%. Yang berarti terpenuhinya semua target capaian yaitu terbinanya potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yang bertujuan meningkatkan Kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Sanggau. Untuk program Pemberdayaan Sosial didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- ❖ Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina dengan target kinerja 16 orang TKSK.
- ❖ Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Lembaga sosial yang dibina dengan target kinerja 4 (empat) Lembaga sosial setiap tahunnya. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial memiliki indikator program yaitu Persentase Lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina yang hanya memiliki satu kegiatan adalah Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial dengan indikator Keluaran Jumlah Lembaga Sosial yang mendapat pembinaan, sasaran kegiatan kelembagaan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten sanggau dengan target kinerja tahun 2025 sebanyak empat lembaga. Berkaitan dengan aspek pembinaan terhadap keberadaan kelembagaan sosial seperti Karang Taruna, Yayasan Sosial termasuk didalamnya juga sinergi pemberdayaan TAGANA. Sampai dengan Tahun 2025 terdapat 160 Karang Taruna dan 10 Yayasan Sosial di Kabupaten Sanggau.

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, realisasi capaian indikator program ini adalah 91,19%. Yang berarti terpenuhinya semua target capaiannya yaitu 91,19%. Adapun indikator dari program tersebut adalah persentase warga negara migran yang terfasilitasi. Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan orang memiliki indikator keluaran yaitu jumlah pekerja eks migran/orang terlantar/trafficking yang tertangani dengan target sebanyak 200 orang selama satu tahun, adapun yang menjadi sasaran kinerja yaitu pekerja eks migran dan orang terlantar yang ada di Kabupaten Sanggau dan menjadi Tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Indikator hasil dari kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan

perdagangan orang yaitu Terpenuhinya jumlah pekerja eks migran/orang terlantar/ Trafficking yang tertangani. Pada tahun 2024 kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial terealisasi sebesar 94,73%.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator program adalah persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terfasilitasi dengan target kinerja sebesar 100% dengan realisasi capaian indikator program sebesar 96,27% yang berarti terpenuhinya semua target capaian yaitu penyediaan permakanaan, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat serta pemberian layanan rujukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

❖ Penyediaan Permakanan

Indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota. Untuk target kinerja Penyediaan Permakanan memiliki target sebanyak 250 orang . Dengan indikator hasil dari kegiatan adalah Terpenuhinya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota.

❖ Penyediaan Sandang

❖ Penyediaan Alat Bantu

❖ Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

❖ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial.

❖ Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat. Fasilitasi Penerima Bantuan Sosial memiliki sasaran kegiatan yaitu Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Sanggau. Jumlah penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas 245 orang untuk tahun 2024, berupa bantuan dana yang bersifat stimulan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Bantuan sosial yang diberikan 1 (satu) kali pertahun sejumlah Dua Juta Rupiah (Rp.2.000.000) serta bantuan sembako sejumlah 100 paket bagi

penyandang disabilitas di Kabupaten Sanggau. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini dibantu Tenaga kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertanggung jawab di tiap kecamatan berjumlah 15 orang.

- ❖ Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak.
- ❖ Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
- ❖ Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- ❖ Pemberian Layanan Kedaruratan
- ❖ Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga.

❖ Pemberian Layanan Rujukan

Dengan indikator sub kegiatan yaitu 186 orang dengan gangguan jiwa yang ada di Kabupaten Sanggau. Penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan di fasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau untuk mendapatkan perawatan medis secara langsung di Rumah Sakit Jiwa Kota Singkawang dengan bantuan pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Fasilitasi penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan memiliki indikator keluaran yaitu Jumlah Orang yang sudah tertangani dengan indikator hasil Terpenuhinya orang dengan gangguan jiwa yang ditangani. Diharapkan dengan adanya kegiatan Fasilitasi penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat memberikan kemudahan pada orang dengan gangguan jiwa yang memiliki keterbatasan biaya untuk berobat dapat difasilitasi hingga kembali pulih. Fasilitasi yang diberikan berupa melengkapi dokumen kependudukan serta syarat lainnya dalam rangka mengusulkan ODGJ mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta PBI –ABPD, hingga fasilitasi ODGJ mendapatkan layanan perawatan dan pengobatan hingga resosialisasi ODGJ layak pulang ke keluarga.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator program adalah Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dengan target kinerja 90% dengan realisasi capaian program sebesar 90% yang berarti terpenuhinya semua target capaian pada 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar dengan satu sub kegiatan yaitu Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar dengan target indikator kinerja 9 Panti Asuhan yang mendapat pembinaan dan memberikan pelayanan kesehatan.

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun dengan target 2 Dokumen dalam satu tahun.

❖ Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memiliki Indikator Kinerja Program/Kegiatan yaitu Tersedianya Data Kemiskinan Kabupaten Sanggau dengan sasaran kegiatan yaitu jumlah penduduk miskin sebanyak 125.412 Penduduk Miskin (data ini bersifat fluktuatif tergantung hasil verifikasi dan validasi data DTKS melalui aplikasi SIK-NG. Pendataan penduduk miskin merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah dikarenakan data ini akan menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan bantuan sosial pemerintah pusat dan daerah serta titik tolak untuk pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat.

Kegiatan pendataan penduduk miskin akan disinkronisasikan dengan data administrasi kependudukan. Untuk itu, maka telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara DINSOSP3AKB dengan DISDUKCAPIL Kabupaten Sanggau. Untuk pelaksanaan Pendataan Penduduk Miskin, juga bersinergi dengan pihak desa dan kelurahan melalui pemanfaatan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan dan perbaikan data penduduk miskin. Langkah yang sudah diambil adalah dengan memanfaatkan anggaran Dana Desa untuk membiayai Honorarium Petugas Operator Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data melalui program SIK-NG. Data

kemiskinan harus selalu diupdate agar bantuan sosial dan jaminan kesehatan tepat sasaran dan tepat penerima.

- ❖ Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 1 Dokumen. Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau dituangkan dalam Aplikasi SIDOMPU, dengan adanya aplikasi SIDOMPU memberikan kemudahan dalam hal memverifikasi data kependudukan melalui nomor induk kependudukan sehingga hasil verifikasi tersebut akan dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- ❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target kinerja 5 Jenis Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat yaitu Bantuan Kube, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Sarana Lingkungan, Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Program Keluarga Harapan.
 - Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan. Program Keluarga Harapan ini memiliki sasaran Keluarga Penerima Manfaat pada tahun 2025 berjumlah 7.901 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan mempunyai Sumber Daya Manusia yang disebut pendamping PKH di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau yang bertugas mendampingi KPM PKH. Program Keluarga Harapan ini bersentuhan langsung kepada masyarakat karena bantuan diterima oleh KPM melalui transfer yang dikirim ke masing-masing rekening KPM PKH. Adapun yang menjadi indikator keluaran kegiatan Program Keluarga Harapan adalah Jumlah keluarga penerima manfaat serta yang menjadi Indikator Hasil adalah Terpenuhinya Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan. Besarnya bantuan yang diterima oleh

- Keluarga Penerima Manfaat tidak sama dikarenakan setiap keluarga penerima manfaat memiliki kebutuhan yang berbeda.
- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni memiliki indikator program yaitu Persentase Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani. Untuk tahun 2025 Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ditargetkan sebanyak 23,05 % selama setahun. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni hanya memiliki satu kegiatan yaitu Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang memiliki indikator keluaran yaitu Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di Rehabilitasi Sosial yang memiliki sasaran kinerja Rumah Tidak Layak Huni dan yang menjadi indikator hasil adalah Terpenuhinya Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni dengan stimulant Bahan Bangunan Rumah. Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau. Kegiatan RTLH disinergikan dengan Nilai DOMPU yang merupakan nilai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sanggau. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni DOMPU dilaksanakan dengan asas gotong royong dan kerjasama antar semua pihak. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau hanya memberikan bantuan stimulant berupa bahan bangunan kepada masyarakat miskin, sedangkan untuk pekerjaannya diharapkan adanya bantuan dari masyarakat dilokasi RTLH DOMPU dilaksanakan. Program RTLH telah dilaksanakan sejak Tahun 2017 dan untuk Tahun 2023 jumlah RTLH DOMPU dilaksanakan untuk 46 RTLH dan ditambah 1 RTLH bekerjasama dengan TNI (lokasi Desa Semanget Kecamatan Entikong). Sampai dengan Tahun 2019 jumlah proposal pengajuan bantuan RTLH sebanyak 1.167 buah dan untuk tahun 2020 yang dapat ditampung sebanyak 46 buah. Program RTLH ini dilaksanakan salah satu tujuannya adalah untuk

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2024 total RTLH yang sudah teralisasi sebanyak 534 RTLH.

- ❖ Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan target kinerja 6 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam satu tahun anggaran. Dengan indikator anggaran Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan.

5. Program Penanganan Bencana

Penanggulangan korban bencana memiliki sasaran kegiatan yaitu Korban bencana yang mana indikator keluaran kegiatan tersebut adalah jumlah Penerima Bantuan Bencana serta indikator Hasilnya berupa Terpenuhinya jumlah penerima bantuan Bencana yang ditangani yang memiliki target kegiatan sebanyak 300 korban bencana selama setahun. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban musibah bencana alam seperti banjir, kebakaran dan tanah longsor serta bencana sosial seperti kerusuhan, konflik sosial dan sebagainya. Bantuan yang diberikan berupa sandang dan pangan yang diharapkan dapat sedikit meringankan beban korban yang tertimpa musibah.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawana memiliki sasaran kegiatan Taman Makam Pahlawana yang memiliki target kinerja selama setahun adalah Tiga Taman Makam Pahlawan yang dipelihara. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawanan ini juga diperuntukan untuk kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Ada 3 TMP yang harus dipelihara di Kabupaten Sanggau yaitu TMP Patriot Bangsa, TMP Pangsuma Meliau dan TMP Temenggung Gergaji Sekayam. Kegiatan ini perlu dukungan pembiayaan agar TMP tidak lagi dianggap lokasi yang kurang baik namun diarahkan bisa dijadikan sebagai lokasi wisata.

Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak

Sasaran 2 memiliki dua indikator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA), ditunjang dengan 5 (Lima) Program yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); Program Perlindungan Khusus Anak didukung dengan 11 (sebelas) kegiatan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota; Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota; Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota Bidang Pemberdayaan Perempuan. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota; Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota; Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota; Bidang Perlindungan Anak. Berikut capaian Kinerja sasaran 2 tersaji pada tabel :

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	Indikator:			
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,65	61,65	100%
	Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)	Madya	Madya	100%
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	13,00 %	13,00%	100%
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

	Program Perlindungan Perempuan	100 %	100%	100%
	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota	0.0046	0,0046	80%
	Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	100 %	100%	100%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100%
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	96,32%	96,32
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam	100%	91,14%	91,14

	mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,88%	97,88%
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100 %	98,50%	98,50%
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	100%	98,50%	98,50%

	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100 %	98,10 %	98,10 %
	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	100%	98,46%	98,46%
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	98,04%	98,04%
	Program Perlindungan Khusus Anak	100%	100%	100%
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%
	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	2 Dok	2 Dok	100%

	husus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota			
--	---	--	--	--

Dari sasaran strategis Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA) merupakan sasaran strategis kedua dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2025-2029. Sasaran strategis ini mempunyai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta Indeks pembangunan Gender yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas. Sasaran strategis meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender memiliki Lima program yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator capaian program Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun dengan target indikator program 100%. Yang didukung oleh satu kegiatan yaitu kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota dan satu sub kegiatan yaitu Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

Dokumen Indikator Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dengan indikator Hasil adalah Terpenuhinya penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Pada tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau akan mengikuti kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dan berhasil mendapatkan predikat dengan kategori Pratama. Untuk dapat

memperoleh penghargaan tersebut ada tujuh syarat Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam melaksanakan PUG. Adapun ketujuh prasyarat tersebut adalah :

No.	Komponen	Pelaksanaan
1.	Komitmen	Pejabatpengambil keputusan (peraturan tentang pelaksanaan PUG Pusat dan Daerah)
2.	Kebijakan	Adanya RPJMN/RPJMD yang responsive Gender
		Renstra Kementerian/Renstra Eselon 1/SKPD/OPD, Juklak, Juknis.
3.	Kelembagaan (Lembaga)	Adanya Pokja PUG (termasuk 6 Focal Point PUG)
		Adanya rencana tahunan Pokja PUG
		Adanya Laporan Tahunan Pokja PUG
4.	a. Sumber Daya Manusia	Tersedianya SDM yang telah mengikuti pelatihan (capacity buiding PUG/PPRG
		Tersedianya SDM yang sudah mengikuti TOT Fasilitator PUG/PPRG.
	b. Sumber Daya Anggaran	Adanya alokasi anggaran untuk (capacity buiding) PUG/PPRG
		Adanya ARG
5.	Alat Analisis Gender	Alat analisis gender yang digunakan (GAP, Harvard, dll)
6.	Data Gender	Tersedianya Statis gender/Profil gender/data terpilah.
7.	Peran serta masyarakat	Adanya lembaga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PUG

Untuk mendapat kan Anugrah Parahita Ekaparaya, maka ketujuh komponen tersebut harus terpenuhi.

pemberdayaan Gender (IDG) dengan target sebesar 61,35 % sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengn target 80,55 %. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan memiliki 6 kegiatan untuk menunjang target capaian kinerja diatas. Indeks pembangunan Gender atau biasa yang dikenal dengan IPG adalah ukuran yang digunakan untuk

mengetahui pembangunan manusia. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila angka IPG sama dengan IPM. Apabila angka IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat dilihat dari selisih antara IPM dan IPG, semakin kecil selisih antara IPM dan IPG maka dapat diartikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau memiliki enam kegiatan guna menunjang pertumbuhan IPG dan IDG.

pembinaan organisasi perempuan memiliki sasaran kinerja yaitu Organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sanggau dengan target kinerja sebanyak 40 Organisasi perempuan yang mendapat pembinaan. Adapun yang menjadi indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan dan yang menjadi indikator hasil dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya organisasi perempuan yang mendapat pembinaan. Adapun yang menjadi tujuan diselenggarakannya kegiatan pembinaan organisasi perempuan adalah

- a. Meningkatnya komitmen organisasi perempuan dalam program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- b. Meningkatnya kapasitas penguatan kelembagaan dan jejaring untuk optimalisasi pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Sanggau.

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan pembinaan organisasi perempuan adalah menggugah partisipasi perempuan Kabupaten

Sanggau untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dengan ikut ambil bagian dalam kemajuan pembangunan.

2. Program Perlindungan Perempuan

Program perlindungan Perempuan memiliki indikator program yaitu Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani dengan target kinerja program sebesar 100%. Program tersebut memiliki tiga kegiatan yaitu Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan satu sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota, Kegiatan Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota dengan satu sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota; kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota didukung satu sub kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Tujuan dari program tersebut adalah untuk meminimalisir dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga perempuan terlindungi dan mendapat pendampingan hukum.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga memiliki 2 (Dua) Kegiatan, masing-masing kegiatan memiliki 1 sub kegiatan.

4. Program Pengelolaan Data Gender dan Anak

Program Pengelolaan Data Gender dan Anak memiliki indikator program yaitu Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik yang didukung oleh satu kegiatan yaitu Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.

Dan satu sub kegiatan yaitu Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota.

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) memiliki indikator program yaitu Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota yang didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota, dan kegiatan yang ke dua yaitu kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota yang didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota dan Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak memiliki indikator Program yaitu Persentase kasus kekerasan anak tertangani yang didukung oleh dua kegiatan yaitu Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota. Dan kegiatan yang ke dua yaitu kegiatan Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota yang didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan yaitu Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah

Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota, Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak dengan sasaran kegiatan kepala desa, kepala dusun, Tokoh Masyarakat, Guru, PKK Desa dan anak-anak. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak ini bertujuan untuk menurunkan angka kekerasan dan pencabulan terhadap anak serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Untuk tahun 2023 ada tujuh desa yang menjadi target kinerja kegiatan, dengan capaian kinerja sebanyak 83,03 %. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak bertsentuhan langsung pada anak korban kekerasan atau pencabulan, sehingga anak korban kekerasan atau pencabulan mendapat perlindungan hukum yang langsung difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau hingga proses hukumnya selesai. Indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah jumlah peserta sosialisasi terkait perlindungan anak dengan indikator hasil Terpenuhinya Desa yang telah berkomitmen layak anak.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keberhasilan Ber KB

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Keberhasilan Ber KB	Indikator : Total Fertility Rate	2.21	2.21	100%

	Program Pengendalian Penduduk	2.22 Point	2.22 Point	100 %
	Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	3 Dok	3 Dok	100%
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	71,23 %	65,00 %	91,25 %
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	6 Dok	6 Dok	100%

	penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal			
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	15 Orang	15 Orang	100%
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	33 Faskes	33 Faskes	100%
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	4 Dok	4 Dok	100%

	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	71,04 %	61,23 %	86,19 %
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	12 Kelompok	12 Kelompok	100%
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Lap	1 Lap	100%

Dari sasaran strategis meningkatnya penduduk yang ber KB memiliki sasaran indikator yaitu Total Fertility Rate dengan target 2,21 pertahun. pada sasaran strategis ini memiliki empat program dan memiliki delapan kegiatan untuk menunjang guna tercapainya Total Fertility Rate. Total Fertility rate ialah istilah yang digunakan

dibidang Demografi untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang terlahir dari seorang wanita sepanjang hidupnya bila ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik usia terkini yang pasti dan ia akan selamat dari kelahiran sepanjang reproduktifnya. Untuk target sasaran pada indikator sasaran strategis Total Fertility Rate adalah dengan treb angka yang menurun. Karena jika angka kelahiran menurun, maka Program Keluarga Berencana dianggap berhasil. Angka kelahiran menurut kelompok umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR), ASFR 15-19 sebesar 38 berarti bahwa dalam satu juta wanita 15-19 tahun secara rata-rata mempunyai 38 anak selama usia suburnya. Adapun empat program yang dapat mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut adalah :

1. Program Pengendalian Penduduk

Program Keluarga Berencana dengan indikator kinerja yaitu persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif dengan taget kinerja pada tahun 2021 sebesar 66,23%. Program keluarga Berencana memiliki enam kegiatan yang empat kegiatannya bersumber dari dana DAU dan dua kegiatannya bersumber dari Dana DAK. Program Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penaggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya. Untuk menunjang program keluarga berencana memiliki enam kegiatan, adapun kegiatan tersebut adalah:

- 1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk.

Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan yaitu sub kegiatan penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK), Sub

kegiatan penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan serta sub kegiatan Penguatan Kerjasama pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal.

2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota didukung oleh lima sub kegiatan, dimana kelima sub kegiatan ini yang akan mendukung tercapainya indikator kinerja pada kegiatan tersebut, Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah :

1. Membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integritas Program KKBPK disektor lain.
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan system informasi keluarga.
3. Pencatatan dan pengumpulan data keluarga
4. Pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB
5. Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan Program KKBPK.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program pembinaan keluarga berencana (KB) memiliki 4 (empat) kegiatan, dimana keempat kegiatan tersebut ada berasal Dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun keempat kegiatan tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

Kegiatan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi KB sesuai kearifan budaya lokal memiliki lima sub kegiatan yang menunjang tercapainya capaian kinerja pada kegiatan tersebut. Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah :

- 1) Advokasi program KKBPK kepada Stakeholders dan mitra kerja.
 - 2) Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan Elektronik serta media luar ruang.
 - 3) Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Mimilok).
 - 4) Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK.
 - 5) Pengendalian Program KKBPK.
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).

Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) didukung oleh satu sub kegiatan, dimana sub kegiatan tersebut di akomodir oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun sub kegiatan tersebut adalah sub kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP).

3. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota didukung oleh empat sub kegiatan untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun keempat sub kegiatan tersebut adalah:

- 1) Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
 - 2) Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
 - 3) Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
 - 4) Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan dalam menunjang tercapainya capaian kinerja program kegiatan. Adapun ketiga sub kegiatan tersebut adalah :
- 1) Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
 - 2) Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB
 - 3) Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) didukung oleh 2 (dua) kegiatan. Adapun dua kegiatan tersebut adalah :

1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

didukung oleh lima sub kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja program kegiatan tersebut, dimana program kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung terhadap program penurunan Stunting. Dimana kegiatan ini didukung oleh lima sub kegiatan untuk dapat menunjang tercapainya target kinerja pada kegiatan tersebut, Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah:

- 1) Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
 - 2) Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS).
 - 3) Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS).
 - 4) Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)
 - 5) Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga didukung oleh satu sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pendagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan Operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS).

Adapun table Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinsosp3akb dan Pencapaian Renstra DINSOSP3AKB s/d Tahun 2025 Kabupaten Sanggau

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsosp3akb Tahun 2027)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinsosp3akb Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsosp3akb s/d Tahun berjalan	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					DINSOSP3AKB KAB. SANGGAU									
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	OUTPUT								7.087
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	100%	100%	100%	100%			100%	4.100
1	06	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	700
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

						Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
1	06	01	2.02		Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen		30 Dokumen		800
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang	100	38 Orang	38 Orang	100
1	06	01	2.02	0002	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

1	06	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen				300
1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100		2 Dokumen	100
1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100		2 Dokumen	100
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100		3 Laporan	100

1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	600
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 paket	63 paket	63 paket	-	100	63 paket	63 paket	100
1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100
1	06	01	2.05	0004	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100
1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100	16 Orang	16 Orang	100
1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100	35 Orang	35 Orang	100
1	06	01	2.06		ADMNISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis		10 Jenis	10 Jenis	900
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100	5 paket	5 paket	100
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100	8 Paket	8 Paket	100

1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1095 Dokumen	1095 Dokumen	1095 Dokumen	1095 Dokumen	100	1095 Dokumen	1095 Dokumen	100
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192 Laporan	192 Laporan	192 Laporan	192 Laporan	100	192 Laporan	192 Laporan	100
1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100
1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokuemn Pengadaan Barang Milik Daerah yang disusun	26 Unit	9 Unit	26 Unit	26 Unit			13 Unit	200
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100	9 unit	9 unit	100
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit	0	16 unit	16 unit				100

1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis			3 Jenis	300
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	256 Laporan	256 Laporan	256 Laporan	256 Laporan	100	256 Laporan	256 Laporan	100
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	41 Unit	41 Unit	41 Unit	41 Unit			3 Jenis	300
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	100	40 Unit	94 Unit	100
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
					URUSAN SOSIAL									<u>2.987</u>
1	06	02			PROGRAM PEMBEREDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%			<u>200</u>

1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yang mendapat pembinaan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100%		4 Lembaga	200
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100	16 Orang	16 Orang	100
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100	4 Lembaga	4 Lembaga	100
1	06	02	2.03	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%				<u>100</u>
1	06	03	2.01		Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Jumlah Dokumen Pemulangan Warga Negara Migran yang terfasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			DAU	100
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100	200 Orang	200 Orang	100

					dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan									
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang tertangani	100%	-	-	-					1.187
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang tertangani	795 Orang	-	-	-		795 Orang	795 Orang		1.187
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	425 Orang	425 Orang	425 Orang	425 Orang	100	425 Orang	425 Orang		100
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/kota	471 Orang	471 Orang	471 Orang	471 Orang	100	471 Orang	471 Orang		100
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	20 Orang		100
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100	30 Orang	30 Orang		100
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	100	250 Orang	250 Orang		100

1	06	04	2.01	0006	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	560 Orang	560 Orang	560 Orang	560 Orang	87	560 Orang	543 Orang	87
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang Disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota.	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	20 Orang	100
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	141 Orang	141 Orang	141 Orang	141 Orang	100	141 Orang	141 Orang	100
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	560 Orang	560 Orang	560 Orang	560 Orang	100	560 Orang	560 Orang	100
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100	10 Orang	10 Orang	100
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100	75 Orang	75 Orang	100
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang	370 Orang	370 Orang	370 Orang	100	370 Orang	370 Orang	100

1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat	90%	90%	90%	90%			9 Panti	<u>700</u>
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan	628 Orang	608 Orang	628 Orang	628 Orang		628 Orang	628 Orang	300
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	100
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	100
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	608 Orang	608 Orang	608 Orang	608 Orang	100	608 Orang	607 Orang	100
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	400
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150.000 Orang	195.092 Orang	195.092 Orang	195.092 Orang	100	195.092 Orang	195.092 Orang	100
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Orang	49.957 Keluarga	49.957 Keluarga	49.957 Keluarga	100	49.957 Keluarga	49.957 Keluarga	100

1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	125.448 Keluarga	125.448 Keluarga	125.448 Keluarga	100	125.448 Keluarga	125.448 Keluarga	100
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000 Usulan	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100	6 Orang	6 Orang	100
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	100 %	100 %	100 %	100 %				<u>700</u>
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang		150 Orang	150 Orang	200
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100	75 Orang	75 Orang	100
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100	75 Orang	75 Orang	100
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	15 Unit	100
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	115 Orang	115 Orang	115 Orang	100	115 Orang	115 Orang	100

1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	115 Orang	115 Orang	115 Orang	100	115 Orang	115 Orang	100
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		100%	100%	100%	100%				<u>100</u>
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang di pelihara	3 TMP	3 TMP	3 TMP	3 TMP		3 TMP	3 TMP	100
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	3 TMP	3 TMP	3 TMP	100	3 TMP	3 TMP	100
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									<u>1.400</u>
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun	100%	100%	100%	100%				<u>600</u>
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan indikator APE	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah			3 Dokumen	100
2	08	02	2.01	0003	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	100	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	100

						Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	08	02	2.02		Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan terhadap Kaum Perempuan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	200
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	08	02	2.02	0002	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	100	2 Organisasi	2 Organisasi	100
2	08	02	2.02	0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	3 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	-	-	-	-	-	-	-

2	08	02	2.03		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	300
2	08	02	2.03	0001	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	100	31 Lembaga	31 Lembaga	100
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100	200 Orang	200 Orang	100
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100%	100%	100%	100%				<u>300</u>
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah		3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100
2	08	03	2.01	0002	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100

						Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	6 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-
2	08	03	2.02		Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang		25 Orang	25 Orang	25 Orang	100
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100
2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	25 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
2	08	03	2.03		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disepakati	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	-	-	-	-				-	100

2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase (%) Peningkatan Kualitas Keluarga yang terpenuhi dalam 2 (dua) Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>200</u>
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 PD	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	100
2	08	04	2.01	0002	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	100
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluargayang mendapat peningkatan kapasitas keluarga yang terpenuhi dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	100

2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %				<u>100</u>
2	08	05	2.01		Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik	70%	70%	70%	70%				<u>200</u>
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-

2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	08	06	2.02	0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	50 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2	08	06	2.02	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan anak tertangani	100%	100%	100%	100%				<u>200</u>
2	08	07	2.01		Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/kota	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	100	30 Dokumen	30 Dokumen	100

2	08	07	2.02		Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMP	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	25 Orang	100
2	08	07	2.02	0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	12 Anak	-	-	-	-	-	-	-
2	08	07	2.02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	25 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2	08	07	2.02	0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									<u>35.786.988</u>
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2.22 point	2.22 point	2.22 point	2.22 point				<u>350</u>

2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tersusun dengan baik	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen			3 Dokumen	100
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	14	02	2.01	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Forma	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	100	23 Kegiatan	23 Kegiatan	50
2	14	02	2.01	0025	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	23 Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	-	

2	14	02	2.01	0029	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	2 Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Pengendalian Penduduk	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	250
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	-	-	-		1 Laporan	1 Laporan	100
2	14	02	2.01	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	50
2	14	02	2.01	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100
2	14	02	2.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan		33 Laporan	33 Laporan	100

2	14	02	2.01	0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif	71,23%	71,23%	71,23%	71,23%				<u>35.786.278</u>
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen			6 Dokumen	400
2	14	03	2.01	0008	Advokasi Program KKBPk Kepada Steakholder dan Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2	14	03	2.01	0012	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4 Organisasi	4 Organisasi	4 Organisasi	100	4 Organisasi	4 Organisasi	100
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader IMP yang dibina	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang		15 Orang	15 Orang	100
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100	15 Orang	15 Orang	100

2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang mendapat pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	33 faskes	33 faskes	33 faskes	33 faskes		33 faskes	33 faskes	280
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12.709 Orang	12.709 Orang	12.709 Orang	12.709 Orang	100	12.709 Orang	12.709 Orang	80
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pembinaan kesertaan ber KB yang tersusun dengan baik	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	35.785.498
2	14	03	2.04	0001	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	100	3 Organisasi	3 Organisasi	35.785.498
2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	8 Unit	-	-	8 Unit	100	8 Unit	8 Unit	-
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Kampung	15 Kampung	15 Kampung	15 Kampung		15 Kampung	15 Kampung	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)	71,04%	71,04%	71,04%	71,04%				<u>360</u>
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapatkan Pembinaan	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok		12 Kelompok	12 Kelompok	160

2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan/Dok	-	-	-	-	-	-	-
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	14	04	2.01	0017	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan konseling remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok		12 Kelompok	12 Kelompok	60
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang		60 Orang	60 Orang	200

					tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	kerja/organisasi kemasyarakatan'									
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan		100
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1173 Laporan	1173 Laporan	1173 Laporan	1173 Laporan	100	1173 Laporan	1173 Laporan		100

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes). Bidang Sosial merupakan bagian dari Enam urusan wajib pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan, Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota. Dalam Peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 5 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 tahun 2022 khusus untuk bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pengampuh SPM, sudah mengakomodir seluruh sub kegiatan yang ada pada Permendagri 84 Tahun 2022, hal ini bertujuan agar pencapaian SPM pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat melakukan pelayanan yang maksimal sesuai dengan target

capaian kinerja yang ada pada SPM Bidang sosial, khususnya bidang Rehabilitasi Sosial. Dimana capaian pelaporan SPM rutin dilakukan secara Triwulan kepada Bangda Kemendagri.

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel 2.2 Terlampir.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINSOSP3AKB
Kabupaten Sanggau

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PMKS yang tertangani	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial;		96,9	97	97,45	97,75	69,06		97,45	97,75	
		Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial		100%	100%	100%	100%	100%		97,45	97,75	
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial;		100%	100%	100%	100%	100%		97,45	97,75	
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan pengemis luar panti sosial;		100%	100%	100%	100%	100%	97,45		97,75	

		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap darurat Bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		100%	100%	100%	100%	100%	97,45		97,75	
2	Persentase PPKS yang mandiri	%		25,00	25,00	26,50	26,50	25,39	25,39		25,60	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%		61,54	61,42	61,54	61,65	71,28	73,86		61,65	
4	Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	%		Madya	Madya	Madya	Madya	Pratama	Madya		Madya	
5	Total Fertility Rate	Point		2.22	2.23	2.22	2.21	2,18	2,21		2.21	
6	Nilai AKIP Dinsosp3akb	%		60,00	65,00	68,00	69,00	69,50	69,72		69,50	

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Seperti yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam menentukan isu-isu strategis serta permasalahan dalam dua tahun kedepan yaitu tahun 2025-2026.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Sosial

Permasalahan utama pelaksanaan urusan sosial adalah:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
- b. Belum terbangunnya sistem perlindungan dan jaminan sosial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:

- a. Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;
- b. Pembangunan responsif gender belum maksimal;
- c. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak belum memadai; dan
- d. Belum optimalnya sarana, prasarana dan penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Belum maksimalnya Advokasi, KIE perempuan dan anak

3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

- a. Sarana dan prasarana pendukung program KB belum memadai;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi); dan
- c. Masih rendahnya akseptor dan partisipasi keikutsertaan pria dalam program KB.
- d. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- e. Belum Optimalnya system pencatatan dan pelaporan pengendalian penduduk

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemenrintah Daerah Kabupaten Sanggau pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2026 terdapat 16 (Enam Belas) Program dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Kegiatan dan 110 (Seratus Sepuluh Sub Kegiatan) terdapat perubahan kodesifikasi dan Nomenklatur dalam penyusunan Rencana Kerja yang tertuang dalam Kepemandagri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penganggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki beberapa sumber dana yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.

Daftar table Review terhadap Rancangan Awal RKPD Terlampir :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Kabupaten Sanggau

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	12
	DINSOSP3AKB KAB.SANGGAU				<u>14.239.564.351,20</u>					<u>15.133.408.645</u>	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				<u>9.306.552.882,20</u>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				<u>9.953.746.603</u>	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	100%	<u>6.314.132.125,20</u>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	100%	<u>6.811.704.808</u>	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 Dokumen	27.089.702,50	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	17 Dokumen	28.444.188	

						Perangkat Daerah		Daerah yang disusun			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.738.257,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.975.170	
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.824.728,00	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.965.964	
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.861.080,50	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.004.135	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.879.616,50	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.073.597	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.005.248,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.205.510	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.529.805,50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.756.296	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.250.967,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.463.515	
	Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi	30 Dokumen	5.653.636.109,60	Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi	30 Dokumen	5.936.317.915	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang	3.446.495.081,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang	3.618.819.835	
	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.026.191.480,00	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.127.501.054	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	151.868.492,10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	159.461.917	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10.037.952,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10.539.850	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.961.979,50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.110.078	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.109.214,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.614.675	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.426.569,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.647.897	
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.545.342,00	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.622.609	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun selama satu tahun	7 Dokumen	13.459.870,00	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun selama satu tahun	7 Dokumen	14.132.864	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.041.623,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.143.704	

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	6.253.057,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	6.565.710	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	5.165.190,00	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	5.423.450	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun selama satu tahun	5 Dokumen	20.518.356,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun selama satu tahun	5 Dokumen	203.410.350	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	5.195.127,45	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	5.454.884	
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dok	5.948.850,75	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dok	6.246.293	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	5.278.588,80	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	5.542.518	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	4.095.789,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	4.300.578	

	Administrasi Umum Perangkat daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia	100%	173.205.786,85	Administrasi Umum Perangkat daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia	100%	181.866.076	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5.937.945,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	6.234.842	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	24.902.850,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	26.147.993	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	26.537.547,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	27.864.424	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1095 Dokumen	6.603.489,90	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1095 Dokumen	6.933.664	
	Penyediaan bahan / Material	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	24.312.200,00	Penyediaan bahan / Material	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	25.527.810	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.298.700,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.363.635	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192 Laporan	75.666.065,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192 Laporan	79.449.368	

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	4.724.421,30	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	4.960.642	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.222.568,65	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.383.697	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Jumlah Laporan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	257.511.010,25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Jumlah Laporan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	270.386.561	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	256 Laporan	2.472.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	256 Laporan	2.595.600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.081.285,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.085.349	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.957.725,25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.705.612	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang di Pelihara	100%	168.711.290,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang di Pelihara	100%	177.146.855	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	129.607.490,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	136.087.865	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	9.600.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	10.080.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.503.800,00	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.978.990	
	URUSAN BIDANG SOSIAL				<u>2.992.420.757,00</u>	URUSAN BIDANG SOSIAL				<u>3.142.041.795</u>	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100,00%	<u>18.671.942,00</u>	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100,00%	<u>19.605.539</u>	
			Persentase PPKS yang mandiri	30,49	-			Persentase PPKS yang mandiri	30,49	-	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota		Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100%	18.671.942,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota		Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100%	19.605.539	

	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang	18.671.942,00	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang	19.605.539	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Jumlah warga Negara Migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	100 Orang	<u>15.032.185,00</u>	PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Jumlah warga Negara Migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	100 Orang	<u>15.783.794</u>	
			Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	80%	-			Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	80%	-	
	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi yang dipulangkan ke daerah asalnya.	100%	15.032.185,00	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi yang dipulangkan ke daerah asalnya.	100%	15.783.794	

	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Kab. Sanggau	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	200 Orang	15.032.185,00	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Kab. Sanggau	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	200 Orang	15.783.794	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	<u>2.131.949.336,00</u>	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	<u>2.238.546.803</u>	
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	-			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	-	
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	-			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	-	
			Persentase Gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	-			Persentase Gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	-	
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial		Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	2.131.949.336,00	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial		Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	2.238.546.803	

	Penyediaan Permakanan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan PemenuhanKebutuhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	943.500,00	Penyediaan Permakanan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan PemenuhanKebut uhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	990.675	
	Penyediaan Sandang	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota.	-	0,00	Penyediaan Sandang	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota.	0	-	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	506.160,00	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	531.468	
	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Orang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	520.000,00	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Orang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	546.000	
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kab. Sanggau	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	5.080.000,00	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kab. Sanggau	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	5.334.000	

	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat.	Kab. Sanggau	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.	1.000 Orang	1.870.003.579,00	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat.	Kab. Sanggau	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.	1.000 Orang	1.963.503.758	
	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	555.000,00	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	582.750	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Orang	442.890,00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Orang	465.035	
	Pemberian layanan kedaruratan	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	520.000,00	Pemberian layanan kedaruratan	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	546.000	
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	2.964.055,00	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	3.112.258	

	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan RujukanKewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang	249.944.067,00	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan RujukanKewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang	262.441.270	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	470.085,00	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	493.589	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat	80%	<u>568.512.866,00</u>	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat		<u>596.938.509</u>	
	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar		Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan	628 Orang	181.023.165,00	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar		Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan	628 Orang	190.074.323	
	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	520.000,00	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	546.000	

	Rujukan Anak-anak Terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	496.170,00	Rujukan Anak-anak Terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	520.979	
	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	608 Orang	180.006.995,00	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	608 Orang	189.007.345	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun	2 Dokumen	387.489.701,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun	2 Dokumen	406.864.186	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150.000 Orang	112.948.505,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150.000 Orang	118.595.930	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Sanggau	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	24.168.425,00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Sanggau	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	25.376.846	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	236.123.279,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	247.929.443	

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1.000 Usulan	14.249.492,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1.000 Usulan	14.961.967	
	PROGRAM PENANGAN BENCANA		Persentase korban bencana alam, sosial dan / non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan tanggap darurat bencana	100%	<u>41.915.806,00</u>	PROGRAM PENANGAN BENCANA		Persentase korban bencana alam, sosial dan / non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan tanggap darurat bencana	100%	<u>44.011.596</u>	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun	100%	41.915.806,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun	100%	44.011.596	
	Penyediaan Makanan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	39.978.923,00	Penyediaan Makanan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	41.977.869	

	Penyediaan Sandang	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	524.364,00	Penyediaan Sandang	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	550.582	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	499.500,00	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	524.475	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Sanggau	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	418.914,00	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Sanggau	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	439.860	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Sanggau	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	494.105,00	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Sanggau	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	518.810	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang di kelola dengan baik	100%	<u>216.338.622,00</u>	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang di kelola dengan baik	100%	<u>227.155.553</u>	

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	216.338.622,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	227.155.553	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	216.338.622,00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	227.155.553	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				<u>1.354.176.699,00</u>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				<u>1.421.885.534</u>	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	13,00%	<u>1.135.508.654,00</u>	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	13,00%	<u>1.192.284.087</u>	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Presentase hasil perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi/Pelatihan	100%	21.773.920,00	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Presentase hasil perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi/Pelatihan	100%	22.862.616	

	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	28 Perangkat Daerah	21.773.920,00	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	(0)	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	28 Perangkat Daerah	22.862.616	
	Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Kaum perempuan yang mendapatkan sosialisasi terkait Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	43.750.458,00	Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Kaum perempuan yang mendapatkan sosialisasi terkait Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	45.937.981	
	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	3 Lembaga	43.750.458,00	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	3 Lembaga	45.937.981	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota		Persentase Organisasi Perempuan yang mendapatkan pembinaan	100%	1.069.984.276,00	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota		Persentase Organisasi Perempuan yang mendapatkan pembinaan	100%	1.123.483.490	

	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	1 Laporan	17.575.395,00	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	1 Laporan	18.454.165	
	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	31 Lembaga	1.028.153.644,00	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	31 Lembaga	1.079.561.326	
	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	24.255.237,00	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25.467.999	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persetase Perempuan korban kekerasan dan TTPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	<u>43.669.120,00</u>	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persetase Perempuan korban kekerasan dan TTPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	<u>45.852.576</u>	
	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Rasio KDRT	0,0046	21.847.213,00	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Rasio KDRT	0,0046	22.939.574	

	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	2 Kegiatan	21.847.213,00	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	2 Kegiatan	22.939.574	
	Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota		Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih dilaynan unit terpadu	100%	21.821.907,00	Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota		Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih dilaynan unit terpadu	100%	22.913.002	
	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	25 Orang	21.821.907,00	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	25 Orang	22.913.002	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	100%	<u>54.997.064,00</u>	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	100%	<u>57.746.917</u>	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	100%	<u>54.997.064,00</u>	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	100%	<u>57.746.917</u>	

	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/ Kota Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	40 Orang	22.627.756,00	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/ Kota Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	40 Orang	23.759.144	
	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	150 Orang	32.369.308,00	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	150 Orang	33.987.773	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik	100%	<u>44.999.941,00</u>	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik	100%	<u>47.249.938</u>	
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun	2 Dokumen	44.999.941,00	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun	2 Dokumen	47.249.938	
	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	44.999.941,00	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	47.249.938	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik	100%	<u>50.750.670,00</u>	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik	100%	<u>53.288.204</u>	

	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Kualitas hidup anak yang tersedia	33 Lembaga	50.750.670,00	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Kualitas hidup anak yang tersedia	33 Lembaga	53.288.204	
	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	50.750.670,00	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	53.288.204	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase kasus kekerasan anak tertangani	100%	<u>24.251.250,00</u>	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase kasus kekerasan anak tertangani	100%	<u>25.463.813</u>	
	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang disusun	2 Dokumen	24.251.250,00	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang disusun	2 Dokumen	25.463.813	
	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	25 Orang	24.251.250,00	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	25 Orang	25.463.813	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				<u>3.578.834.770,00</u>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				<u>3.757.776.509</u>	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka kelahiran Remaja Umur 15-19 (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	42,55%	<u>293.237.977,00</u>	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka kelahiran Remaja Umur 15-19 (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	42,55%	<u>307.899.876</u>	
	Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Sanggau	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5,20%	78.263.771,00	Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Sanggau	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5,20%	82.176.960	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Sanggau	Tersedianya laporan tahunan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	1 Laporan	61.600.000,00	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Sanggau	Tersedianya laporan tahunan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	1 Laporan	64.680.000	
	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan antara tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Sanggau	Jumlah indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah provinsi dan kabupaten/kota Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	1 Indikator	717.615,00	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan antara tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Sanggau	Jumlah indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah provinsi dan kabupaten/kota Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS,	1 Indikator	753.496	

								serta Jalur Nonformal dan Informal			
	Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.685.468,00	Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.069.741	
	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Kab. Sanggau	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	2 Laporan	8.260.688,00	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Kab. Sanggau	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	2 Laporan	8.673.722,40	

	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100%	214.974.206,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100%	225.722.916	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	83.274.206,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	87.437.916	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	81.000.000,00	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	85.050.000	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	15 laporan	50.700.000,00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	15 laporan	53.235.000	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (Mpcr)	67,30%	<u>852.900.450,00</u>	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (Mpcr)	67,30%	<u>895.545.473</u>	

	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Kab. Sanggau	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (Mpcr)	74,96	241.665.450,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Kab. Sanggau	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (Mpcr)	74,96	253.748.723	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	225.000.000,00	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	236.250.000	
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	16.665.450,00	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	17.498.723	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Sanggau	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	100%	126.750.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Sanggau	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	100%	133.087.500	

	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Sanggau	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	15 Orang	126.750.000,00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Sanggau	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	15 Orang	133.087.500	
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Persentase Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	484.485.000,00	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Persentase Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	508.709.250	
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12.709 Orang	373.185.000,00	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12.709 Orang	391.844.250	
	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	35.100.000,00	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	36.855.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	1 Laporan	76.200.000,00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	1 Laporan	80.010.000	

	termasuk jaringan dan jejaringnya.		Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.		Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Keluarga Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	71,04%	<u>2.432.696.343,00</u>	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Keluarga Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	71,04%	<u>2.554.331.160</u>	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Sanggau	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada di setiap Kecamatan	100%	16.668.971,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Sanggau	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada di setiap Kecamatan	100%	17.502.420	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	16.668.971,00	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	17.502.420	

	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sanggau	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	53,33%	2.416.027.372,00	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sanggau	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	53,33%	2.536.828.741	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Sanggau	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1173 Keluarga	2.416.027.372,00	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Sanggau	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1173 Keluarga	2.536.828.741	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2026 terdapat 16 (Enam Belas) Program dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Kegiatan dan 109 (Seratus Sembilan Sub Kegiatan)

Dari Hasil Musyawarah Pembangunan Daerah tingkat kecamatan untuk tahun 2025 terdapat beberapa usulan dari masyarakat yaitu usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) RTLH yang diusulkan oleh beberapa kecamatan dan yang telah berhasil di Verifikasi oleh Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin yang diusulkan untuk tahun 2025. Selain usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diusulkan oleh Masyarakat ada juga beberapa program kegiatan lain yang diusulkan terkait sosialisasi mengenai peningkatan Kapasitas Perempuan terhadap Pembangunan, Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mulai dari pelaporan hingga rujukan ODGJ menggunakan BPJS untuk dapat di antarkan ke Rumah Sakit Jiwa Singkawang untuk di lakukan Rehabilitasi.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sanggau

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab.Sanggau	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota yang di Data	150.000 Orang	

2.	Pemberian Layanan Rujukan	Kab.Sanggau	Jumlah Orang mendapatka n layanan Rujukan kewenangan Kabupaten Sanggau	370 Orang	
----	---------------------------------	-------------	---	--------------	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau memiliki 3 tujuan diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat
2. Meningkatkan penanganan pengendalian penduduk dan KB
3. Meningkatkan penanganan kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Dari ketiga tujuan tersebut Adapun yang menjadi sasaran kinerja adalah :

1. Menekan Angka kemiskinan
2. Meningkatnya PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial
3. Meningkatnya penduduk yang ber KB
4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Anak
5. Status Capaian Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (Kementrian Sosial)

Untuk meningkatkan peran sektor Sosial sebagai penghela pembangunan nasional, Kementerian Sosial pada periode 2015 - 2019 telah menetapkan visi pembangunan sosial, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong ”**. Target utama penetapan visi pembangunan tersebut adalah untuk mewujudkan Dua sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1) Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan Rentan, 2) Sistem penyelenggaraan Kesejahteraan social yang profesional. Hal ini menjadi panduan bagi Kementrian Sosial dalam penyusunan rencana strategis ke depan. Dari penjelasan diatas, keterkaitan antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dengan Kementerian terkait (Sosial) sama-sama berperan untuk menurunkan angka kemiskinan dan memiliki arah kebijakan yaitu :

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
2. Pengembangan kehidupan berkelanjutan
3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.

3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen pemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014.

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Maksud disusunnya Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana Kabupaten Sanggau Tahun 2027 adalah untuk melaksanakan dokumen

perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

Program dan Kegiatan Tahun 2027

Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana Strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan Misi.

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memprogramkan beberapa kegiatan yaitu :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Tahun 2027 dan Prakiraan Maju 2028

Kabupaten Sanggau

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	5	(6)	(7)	(8)	9	(10)
					DINSOSP3AKB KAB. SANGGAU				14.239.564.351				15.133.408.645
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	OUTPUT			9.306.552.882				9.953.746.603
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		100%	6.314.132.125			100%	6.811.704.808
1	06	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		17 Dokumen	27.089.703			17 Dokumen	28.444.188
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	7 Dokumen	4.738.257	DAU		7 Dokumen	4.975.170

1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	2.824.728	DAU		1 Dokumen	2.965.964
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	2.861.081	DAU		1 Dokumen	3.004.135
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	3.879.617	DAU		1 Dokumen	4.073.597
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	4.005.248	DAU		1 Dokumen	4.205.510
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	2 Laporan	4.529.806	DAU		2 Laporan	4.756.296
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	4 Laporan	4.250.967	DAU		4 Laporan	4.463.515
1	06	01	2.02		Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi		30 Dokumen	5.653.636.110			30 Dokumen	5.936.317.915
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	53 Orang	3.446.495.081	DAU		53 Orang	3.618.819.835

1	06	01	2.02	0002	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	12 Dokumen	2.026.191.480	DAU		12 Dokumen	2.127.501.054
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	151.868.492	DAU		1 Dokumen	159.461.917
1	06	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	10.037.952	DAU		1 Dokumen	10.539.850
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Laporan	2.961.980	DAU		1 Laporan	3.110.078
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	10.109.214	DAU		1 Dokumen	10.614.675
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	12 Laporan	4.426.569	DAU		12 Laporan	4.647.897
1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	2 Dokumen	1.545.342	DAU		2 Dokumen	1.622.609

1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di susun selama satu tahun	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	7 Dokumen	13.459.870			7 Dokumen	14.132.864
1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	2 Dokumen	2.041.623	DAU		2 Dokumen	2.143.704
1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	2 Dokumen	6.253.057	DAU		2 Dokumen	6.565.710
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	3 Laporan	5.165.190	DAU		3 Laporan	5.423.450
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun selama satu tahun		5 Dokumen	20.518.356			5 Dokumen	203.410.350
1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	2 Dok	5.195.127	DAU		2 Dok	5.454.884
1	06	01	2.05	0004	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	2 Dok	5.948.851	DAU		2 Dok	6.246.293
1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dok	5.278.589	DAU		1 Dok	5.542.518

1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	35 Orang	4.095.789	DAU		35 Orang	4.300.578
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia		100%	173.205.787			100%	181.866.076
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	5 paket	5.937.945	DAU		5 paket	6.234.842
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	12 Paket	24.902.850	DAU		12 Paket	26.147.993
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	8 Paket	26.537.547	DAU		8 Paket	27.864.424
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1095 Dokumen	6.603.490	DAU		1095 Dokumen	6.933.664
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	12 Paket	24.312.200	DAU		12 Paket	25.527.810
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	12 Laporan	1.298.700	DAU		12 Laporan	1.363.635
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	192 Laporan	75.666.065	DAU		192 Laporan	79.449.368

1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	5 Dokumen	4.724.421	DAU		5 Dokumen	4.960.642
1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	3.222.569	DAU		1 Dokumen	3.383.697
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Laporan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		100%	257.511.010			100%	270.386.561
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	256 Laporan	2.472.000	DAU		256 Laporan	2.595.600
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	12 Laporan	200.081.285	DAU		12 Laporan	210.085.349
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	12 Laporan	54.957.725	DAU		12 Laporan	57.705.612
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang di Pelihara		100%	168.711.290			100%	177.146.855
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	10 Unit	129.607.490	DAU		10 Unit	136.087.865

1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	40 Unit	9.600.000	DAU		40 Unit	10.080.000
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Unit	29.503.800	DAU		1 Unit	30.978.990
1	06				URUSAN BIDANG SOSIAL				2.992.420.757				3.142.041.795
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		100,00%	18.671.942			100,00%	19.605.539
						Persentase PPKS yang mandiri		30,49				30,49	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial		100%	18.671.942			100%	19.605.539
1	06	02	2.03	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Sanggau	100 Orang	18.671.942	DAU		100 Orang	19.605.539
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga Negara Migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan		100 Orang	15.032.185			100 Orang	15.783.794

						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani		80%				80%	
1	06	03	2.01		Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi yang dipulangkan ke daerah asalnya.		100%	15.032.185			100%	15.783.794
1	06	03	2.01	0003	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	Kab. Sanggau	200 Orang	15.032.185	DAU		200 Orang	15.783.794
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%	2.131.949.336			100%	2.238.546.803
						Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%				100%	
						Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%				100%	
						Persentase Gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%				100%	

1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		100%	2.131.949.336			100%	2.238.546.803
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	250 Orang	943.500	DAU		250 Orang	990.675
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota.	Kab. Sanggau	0	-	DAU		-	-
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	15 Orang	506.160	DAU		15 Orang	531.468
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	50 Orang	520.000	DAU		50 Orang	546.000
1	06	04	2.01	0005	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	250 Orang	5.080.000	DAU		250 Orang	5.334.000

1	06	04	2.01	0006	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat.	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.	Kab. Sanggau	1.000 Orang	1.870.003.579	DAU		1.000 Orang	1.963.503.758
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	100 Orang	555.000	DAU		100 Orang	582.750
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Sanggau	40 Orang	442.890	DAU		40 Orang	465.035
1	06	04	2.01	0010	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	10 Orang	520.000	DAU		10 Orang	546.000
1	06	04	2.01	0011	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	50 Orang	2.964.055	DAU		50 Orang	3.112.258
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	370 Orang	249.944.067	DAU		370 Orang	262.441.270
1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	50 Orang	470.085	DAU		50 Orang	493.589

1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat		80%	568.512.866			80%	596.938.509
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan		628 Orang	181.023.165			628 Orang	190.074.323
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	20 Orang	520.000	DAU		20 Orang	546.000
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	20 Orang	496.170	DAU		20 Orang	520.979
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	608 Orang	180.006.995	DAU		608 Orang	189.007.345
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun		2 Dokumen	387.489.701			2 Dokumen	406.864.186
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Sanggau	150.000 Orang	112.948.505	DAU		150.000 Orang	118.595.930
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	100 Orang	24.168.425	DAU		100 Orang	25.376.846

1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	20 Orang	236.123.279	DAU		20 Orang	247.929.443
1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Kab. Sanggau	1.000 Usulan	14.249.492	DAU		1.000 Usulan	14.961.967
1	06	06			PROGRAM PENANGAN BENCANA	Persentase korban bencana alam, sosial dan / non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan tanggap darurat bencana		100%	41.915.806			100%	44.011.596
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun		100%	41.915.806			100%	44.011.596
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	300 Orang	39.978.923	DAU		300 Orang	41.977.869
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	300 Orang	524.364	DAU		300 Orang	550.582
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	300 Orang	499.500	DAU		300 Orang	524.475

1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	300 Orang	418.914	DAU		300 Orang	439.860
1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	15 Orang	494.105	DAU		15 Orang	518.810
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang di kelola dengan baik		100%	216.338.622			100%	227.155.553
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara		100%	216.338.622			100%	227.155.553
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	3 TMP	216.338.622	DAU		3 TMP	227.155.553
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.354.176.699				1.421.885.534
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)		13,00%	1.135.508.654			13,00%	1.192.284.087

2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase hasil perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi/Pelatihan	Kab. Sanggau	100%	21.773.920			100%	22.862.616
2	08	02	2.01	0015	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)		28 Perangkat Daerah	21.773.920	DAU		28 Perangkat Daerah	22.862.616
2	08	02	2.02		Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kaum perempuan yang mendapatkan sosialisasi terkait Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	43.750.458				45.937.981
2	08	02	2.02	0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Kab. Sanggau	3 Lembaga	43.750.458	DAU		3 Lembaga	45.937.981
2	08	02	2.03		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Persentase Organisasi Perempuan yang mendapatkan pembinaan		100%	1.069.984.276			100%	1.123.483.490

2	08	02	2.03	0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Kab. Sanggau	1 Laporan	17.575.395	DAU		1 Laporan	18.454.165
2	08	02	2.03	0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab. Sanggau	31 Lembaga	1.028.153.644	DAU		31 Lembaga	1.079.561.326
2	08	02	2.03	0014	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	2 Dokumen	24.255.237	DAU		2 Dokumen	25.467.999
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persetase Perempuan korban kekerasan dan TTPO yang mendapatkan layanan komprehensif		100%	43.669.120			100%	45.852.576
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	Kab. Sanggau	0,0046	21.847.213			0,0046	22.939.574

2	08	03	2.01	0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Kab. Sanggau	2 Kegiatan	21.847.213	DAU		2 Kegiatan	22.939.574
2	08	03	2.02		Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih dilaynan unit terpadu		100%	21.821.907			100%	22.913.002
2	08	03	2.02	0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	25 Orang	21.821.907	DAU		25 Orang	22.913.002
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar		100%	54.997.064			100%	57.746.917
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	Kab. Sanggau	100%	54.997.064			100%	57.746.917
2	08	04	2.03	0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	40 Orang	22.627.756	DAU		40 Orang	23.759.144

2	08	04	2.03	0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	150 Orang	32.369.308	DAU		150 Orang	33.987.773
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik		100%	44.999.941			100%	47.249.938
2	08	05	2.01		Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun	Kab. Sanggau	2 Dokumen	44.999.941			2 Dokumen	47.249.938
2	08	05	2.01	0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	Kab. Sanggau	2 Dokumen	44.999.941	DAU		2 Dokumen	47.249.938
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik		100%	50.750.670			100%	53.288.204
2	08	06	2.02		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Kualitas hidup anak yang tersedia	Kab. Sanggau	33 Lembaga	50.750.670			33 Lembaga	53.288.204
2	08	05	2.02	0011	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Kab. Sanggau	1 Dokumen	50.750.670	DAU		1 Dokumen	53.288.204
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan anak tertangani		100%	24.251.250			100%	25.463.813

2	08	07	2.02		Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang disusun	Kab. Sanggau	2 Dokumen	24.251.250			2 Dokumen	25.463.813
2	08	06	2.02	0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab. Sanggau	25 Orang	24.251.250	DAU		25 Orang	25.463.813
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.578.834.770				3.757.776.509
2	08	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Remaja Umur 15-19 (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)		42,55%	293.237.977			42,55%	307.899.876
2	08	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Sanggau	5,20%	78.263.771	DAU		5,20%	82.176.960
2	08	02	2.01	0039	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Tersedianya laporan tahunan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Sanggau	1 Laporan	61.600.000	DAK		1 Laporan	64.680.000

2	08	02	2.01	0050	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan antara tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah provinsi dan kabupaten/kota Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Sanggau	1 Indikator	717.615	DAU		1 Indikator	753.496
2	08	02	2.01	0053	Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	1 Dokumen	7.685.468	DAU		1 Dokumen	8.069.741
2	08	02	2.01	0055	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Kab. Sanggau	2 Laporan	8.260.688	DAU		2 Laporan	8.673.722

2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Kab. Sanggau	100%	214.974.206			100%	225.722.916
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Sanggau	1 Laporan	83.274.206	DAK		1 Laporan	87.437.916
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Sanggau	1 Dokumen	81.000.000	DAK		1 Dokumen	85.050.000
2	14	02	2.02	0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa/kelurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Sanggau	15 laporan	50.700.000	DAU		15 laporan	53.235.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (Mpcr)		67,30%	852.900.450			67,30%	895.545.473
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (Mpcr)	Kab. Sanggau	74,96	241.665.450	DAU		74,96	253.748.723

2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Sanggau	1 Laporan	225.000.000	DAK		1 Laporan	236.250.000
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Sanggau	1 Dokumen	16.665.450	DAU		1 Dokumen	17.498.723
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	Kab. Sanggau	100%	126.750.000			100%	133.087.500
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Sanggau	15 Orang	126.750.000	DAK		15 Orang	133.087.500
2	14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Sanggau	100%	484.485.000			100%	508.709.250

2	14	03	2.03	0003	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Sanggau	12.709 Orang	373.185.000	DAK		12.709 Orang	391.844.250
2	14	03	2.03	0029	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Sanggau	1 Laporan	35.100.000	DAU		1 Laporan	36.855.000
2	14	03	2.03	0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Sanggau	1 Laporan	76.200.000	DAK		1 Laporan	80.010.000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga		71,04%	2.432.696.343			71,04%	2.554.331.160
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada di setiap Kecamatan	Kab. Sanggau	100%	16.668.971			100%	17.502.420

2	14	03	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Sanggau	1 Laporan	16.668.971	DAU		1 Laporan	17.502.420
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Kab. Sanggau	0,5333	2.416.027.372			0,5333	2.536.828.741
2	14	04	2.02	0009	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kab. Sanggau	1173 Keluarga	2.416.027.372	DAK		1173 Keluarga	2.536.828.741

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana Strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokume Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Derah

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/verifikasi keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
 - h. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang milik daerah SKPD
 - b. Pengamanan Barang milik daerah
 - c. Penatausahaan barang milik Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyediaan Bahan/Material
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - c. Pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
- 2. Program Pemberdayaan Sosial
 - 1) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- 3. Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
 - 1) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
 - a. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
- 4. Program Rehabilitasi Sosial

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial
 - a. Penyediaan permakanan
 - b. Penyediaan sandang
 - c. Penyediaan alat bantu
 - d. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 - e. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - f. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat.
 - g. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - h. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - i. Pemberian Layanan Kedaruratan
 - j. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - k. Pemberian Layanan Rujukan
 - l. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1) Pemeliharaan anak-anak terlantar
 - a. Penjangkauan anak-anak terlantar
 - b. Rujukan anak-anak terlantar
 - c. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar
 - 2) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pendataan fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - d. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penangan Bencana
 - 1) Perlindungan sosial korban bencana alam sosial Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Makanan
 - b. Penyediaan sandang

- c. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - d. Pelayanan Dukungan Psikososial
 - e. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - a. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota.
8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 1) Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 3) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota
 - a. Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota.
9. Program Perlindungan Perempuan
- 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota.
10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - 1) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota
 - b. Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
 - c. Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota.
11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - 1) Pengumpulan pengolahan Analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.
 - a. Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota.
12. Program Pemenuhan Hak Anak
 - 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

- 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
13. Program Perlindungan Khusus Anak
 - 1) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota.
14. Program Pengendalian Penduduk
 - 1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
 - a. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal.
 - c. Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk capaian daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
 - b. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga.
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.
 - d. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain

15. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 1) Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
 - a. Pengendalian program KKBPK
 - b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
 - c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
 - d. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - e. Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Steakholder dan Mitra Kerja.
 - 2) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB /petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
 - a. Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - 3) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota
 - a. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
 - b. Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
 - c. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - 4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB

- a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
16. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 1) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - a. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).
 - b. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - c. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
 - d. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
 - 2) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga.
 - a. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2027

Kabupaten Sanggau

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	5	(6)	(7)
					DINSOSP3AKB KAB. SANGGAU				14.239.564.351	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	OUTPUT			9.306.552.882	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		100%	6.314.132.125	-
1	06	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		17 Dokumen	27.089.703	-
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	7 Dokumen	4.738.257	DAU

1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	2.824.728	DAU
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	2.861.081	DAU
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	3.879.617	DAU
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	4.005.248	DAU
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	2 Laporan	4.529.806	DAU
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	4 Laporan	4.250.967	DAU
1	06	01	2.02		Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi		30 Dokumen	5.653.636.110	-

1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	53 Orang	3.446.495.081	DAU
1	06	01	2.02	0002	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	12 Dokumen	2.026.191.480	DAU
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	151.868.492	DAU
1	06	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	10.037.952	DAU
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Laporan	2.961.980	DAU
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	10.109.214	DAU

1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	12 Laporan	4.426.569	DAU
1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	2 Dokumen	1.545.342	DAU
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di susun selama satu tahun	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	7 Dokumen	13.459.870	-
1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	2 Dokumen	2.041.623	DAU
1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	2 Dokumen	6.253.057	DAU
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	3 Laporan	5.165.190	DAU
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun selama satu tahun	(0)	5 Dokumen	20.518.356	-

1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	2 Dok	5.195.127	DAU
1	06	01	2.05	0004	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	2 Dok	5.948.851	DAU
1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dok	5.278.589	DAU
1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	35 Orang	4.095.789	DAU
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia		100%	173.205.787	-
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	5 paket	5.937.945	DAU
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	12 Paket	24.902.850	DAU
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	8 Paket	26.537.547	DAU

1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1095 Dokumen	6.603.490	DAU
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	12 Paket	24.312.200	DAU
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	12 Laporan	1.298.700	DAU
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	192 Laporan	75.666.065	DAU
1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	5 Dokumen	4.724.421	DAU
1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Dokumen	3.222.569	DAU
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Laporan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		100%	257.511.010	-
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	256 Laporan	2.472.000	DAU

1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	12 Laporan	200.081.285	DAU
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	12 Laporan	54.957.725	DAU
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang di Pelihara		100%	168.711.290	-
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	10 Unit	129.607.490	DAU
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	40 Unit	9.600.000	DAU
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	1 Unit	29.503.800	DAU
1	06				URUSAN BIDANG SOSIAL				2.992.420.757	-
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		100,00%	18.671.942	-
						Persentase PPKS yang mandiri		30,49	-	-

1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial		100%	18.671.942	-
1	06	02	2.03	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Sanggau	100 Orang	18.671.942	DAU
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga Negara Migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan		100 Orang	15.032.185	-
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani		80%	-	-
1	06	03	2.01		Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi yang dipulangkan ke daerah asalnya.	(0)	100%	15.032.185	-

1	06	03	2.01	0003	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	Kab. Sanggau	200 Orang	15.032.185	DAU
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%	2.131.949.336	-
						Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%	-	-
						Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%	-	-
						Persentase Gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%	-	-
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		100%	2.131.949.336	-

1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	250 Orang	943.500	DAU
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota.	Kab. Sanggau	0	-	DAU
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	15 Orang	506.160	DAU
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	50 Orang	520.000	DAU
1	06	04	2.01	0005	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	250 Orang	5.080.000	DAU
1	06	04	2.01	0006	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat.	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.	Kab. Sanggau	1.000 Orang	1.870.003.579	DAU

1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	100 Orang	555.000	DAU
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Sanggau	40 Orang	442.890	DAU
1	06	04	2.01	0010	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	10 Orang	520.000	DAU
1	06	04	2.01	0011	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	50 Orang	2.964.055	DAU
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	370 Orang	249.944.067	DAU
1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	50 Orang	470.085	DAU
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat		80%	568.512.866	-
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan		628 Orang	181.023.165	-

1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	20 Orang	520.000	DAU
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	20 Orang	496.170	DAU
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	608 Orang	180.006.995	DAU
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun		2 Dokumen	387.489.701	-
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Sanggau	150.000 Orang	112.948.505	DAU
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	100 Orang	24.168.425	DAU
1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	20 Orang	236.123.279	DAU

1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Kab. Sanggau	1.000 Usulan	14.249.492	DAU
1	06	06			PROGRAM PENANGAN BENCANA	Persentase korban bencana alam, sosial dan / non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan tanggap darurat bencana		100%	41.915.806	-
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun		100%	41.915.806	-
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	300 Orang	39.978.923	DAU
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	300 Orang	524.364	DAU
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	300 Orang	499.500	DAU

1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	300 Orang	418.914	DAU
1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	15 Orang	494.105	DAU
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang di kelola dengan baik		100%	216.338.622	-
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara		100%	216.338.622	-
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	3 TMP	216.338.622	DAU
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.354.176.699	-
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)		13,00%	1.135.508.654	-

2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase hasil perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi/Pelatihan	Kab. Sanggau	100%	21.773.920	-
2	08	02	2.01	0015	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)		28 Perangkat Daerah	21.773.920	DAU
2	08	02	2.02		Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kaum perempuan yang mendapatkan sosialisasi terkait Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	43.750.458	-
2	08	02	2.02	0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Kab. Sanggau	3 Lembaga	43.750.458	DAU
2	08	02	2.03		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Persentase Organisasi Perempuan yang mendapatkan pembinaan		100%	1.069.984.276	-

2	08	02	2.03	0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Kab. Sanggau	1 Laporan	17.575.395	DAU
2	08	02	2.03	0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab. Sanggau	31 Lembaga	1.028.153.644	DAU
2	08	02	2.03	0014	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	2 Dokumen	24.255.237	DAU
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persetase Perempuan korban kekerasan dan TTPO yang mendapatkan layanan komprehensif		100%	43.669.120	-
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	Kab. Sanggau	0,0046	21.847.213	-

2	08	03	2.01	0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Kab. Sanggau	2 Kegiatan	21.847.213	DAU
2	08	03	2.02		Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih dilaynan unit terpadu		100%	21.821.907	-
2	08	03	2.02	0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	25 Orang	21.821.907	DAU
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar		100%	54.997.064	-
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	Kab. Sanggau	100%	54.997.064	-

2	08	04	2.03	0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	40 Orang	22.627.756	DAU
2	08	04	2.03	0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	150 Orang	32.369.308	DAU
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik		100%	44.999.941	-
2	08	05	2.01		Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun	Kab. Sanggau	2 Dokumen	44.999.941	-
2	08	05	2.01	0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	Kab. Sanggau	2 Dokumen	44.999.941	DAU
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik		100%	50.750.670	-
2	08	06	2.02		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Kualitas hidup anak yang tersedia	Kab. Sanggau	33 Lembaga	50.750.670	-

2	08	05	2.02	0011	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Kab. Sanggau	1 Dokumen	50.750.670	DAU
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan anak tertangani		100%	24.251.250	-
2	08	07	2.02		Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang disusun	Kab. Sanggau	2 Dokumen	24.251.250	-
2	08	06	2.02	0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab. Sanggau	25 Orang	24.251.250	DAU
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.578.834.770	-
2	08	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Remaja Umur 15-19 (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)		42,55%	293.237.977	-

2	08	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Sanggau	5,20%	78.263.771	DAU
2	08	02	2.01	0039	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Tersedianya laporan tahunan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Sanggau	1 Laporan	61.600.000	DAK
2	08	02	2.01	0050	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan antara tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah provinsi dan kabupaten/kota Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Sanggau	1 Indikator	717.615	DAU
2	08	02	2.01	0053	Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	1 Dokumen	7.685.468	DAU

2	08	02	2.01	0055	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/ OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/ Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/ OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/ Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Kab. Sanggau	2 Laporan	8.260.688	DAU
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Kab. Sanggau	100%	214.974.206	-
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Sanggau	1 Laporan	83.274.206	DAK
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Sanggau	1 Dokumen	81.000.000	DAK

2	14	02	2.02	0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Sanggau	15 laporan	50.700.000	DAU
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (Mpcr)	(0)	67,30%	852.900.450	-
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (Mpcr)	Kab. Sanggau	74,96	241.665.450	DAU
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Sanggau	1 Laporan	225.000.000	DAK
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Sanggau	1 Dokumen	16.665.450	DAU

2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	Kab. Sanggau	100%	126.750.000	-
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Sanggau	15 Orang	126.750.000	DAK
2	14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Sanggau	100%	484.485.000	-
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Sanggau	12.709 Orang	373.185.000	DAK
2	14	03	2.03	0029	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Sanggau	1 Laporan	35.100.000	DAU

2	14	03	2.03	0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Sanggau	1 Laporan	76.200.000	DAK
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga		71,04%	2.432.696.343	-
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada di setiap Kecamatan	Kab. Sanggau	100%	16.668.971	-
2	14	03	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Sanggau	1 Laporan	16.668.971	DAU
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Kab. Sanggau	0,5333	2.416.027.372	-

2	14	04	2.02	0009	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kab. Sanggau	1173 Keluarga	2.416.027.372	DAK
---	----	----	------	------	--	---	--------------	---------------	---------------	-----

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2027.

a. Catatan penting

- 1 Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027 antara lain: Perumusan Program dan Kegiatan beserta indikatornya pada Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
- 2 Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2027 merupakan pedoman dalam melaksanakan Program Kegiatan setelah di lakukan evaluasi kinerja pada tahun anggaran 2025. Selain itu terdapat penyesuaian penambahan dan penyesuaian anggaran/kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau.
- 3 Anggaran pada Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana hampir secara keseluruhan kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan Kepmendagri 900.1.2850 Tahun 2025.
- 4 Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2027 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris dan Seluruh Kepala Bidang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau serta Masyarakat maupun Stake holder.
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan di jabarkan dalam penyusunan Rancangan Awal Program Kerja.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pelaksanaan Rancangan Awal Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan Stakeholder pembangunan di Kabupaten Sanggau.

Demikian dengan tersusunnya Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2027. Agar dapat terwujud konsisten antara Perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kab.Sanggau dan tersusunnya Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau. semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Sanggau, 18 Februari 2026

Pt. KEPALA DINSOSP3AKB KAB.SANGGAU



VALENTINUS SUDARTO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19840204 200604 1 004